

TESIS

**PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT URBANISASI DI
KABUPATEN MAROS**

**THE EFFECT OF PRIVATE INVESTMENT AND
GOVERNMENT SPENDING ON THE LEVEL OF
URBANIZATION IN MAROS DISTRICT**

JENNY OCTARIA PANGGABEAN

A032171011



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT URBANISASI DI KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh :

JENNY OCTARIA PANGGABEAN

A032171011



kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT URBANISASI DI KABUPATEN MAROS

THE EFFECT OF PRIVATE INVESTMENT AND GOVERNMENT SPENDING ON THE LEVEL OF URBANIZATION IN MAROS DISTRICT

Disusun dan diajukan oleh

JENNY OCTARIA PANGGABEAN

NIM A032171011

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **28 Desember 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat,

Ketua

Dr. Paulus Uppun, SE, MA

Anggota

Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., MA.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jenny Octaria Panggabean

NIM : A032171011

Jurusan/program studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT URBANISASI DI KABUPATEN MAROS

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Jenny Octaria Panggabean
Jenny Octaria Panggabean

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT URBANISASI DI KABUPATEN MAROS”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin terwujud semua usaha dalam rangka menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pendamping hidupku Irawan Moses, S.Pd dan anak-anakku tercinta Isabela Chelseanti, Raymond Valenciano, Richard Benficario yang telah memberikan perhatian, motivasi, dorongan serta dukungan moril dan materil. Kalian adalah penyemangat dan masa depanku.
2. Kedua orangtuaku, Ayahanda Johnny B. Panggabean, SE (Alm.) dan Ibunda Dr. Ir. Sriyati Malik, M.Si (Alm.), serta adik-adikku dimanapun berada, juga kedua mertuaku, Ayah mertua Moses Pampabone dan Ibu mertua Tasik Langi yang telah memberikan doa dan semangatnya.
3. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Paulus Uppun, SE.,M.A. dan Dr.Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dr. Madris DPS, SE.,M.Si., Dr. Fatmawati, SE.,M.Si., dan Dr.Hamrullah, SE.,M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran terkait penyusunan tesis penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan memperoleh ilmu baru yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan.
7. Segenap dosen Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di PS-MEPP.
8. Seluruh staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu proses administrasi selama penulis berproses di Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman seperjuangan EPP 2017 atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
10. Teman-teman di kantor Bappeda Maros yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Hasanuddin.
11. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis cantumkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan banyak pihak

Makassar, 28 Desember 2020

Penulis

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Jenny Octaria Panggabean
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 13 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Arung Teko, Perumahan Bukit Sejahtera 1 Blok
C.1/No. 9, Sudiang, Makassar
Telepon Rumah dan HP : 082194384436
Alamat E-mail : jennyoctaria@gmail.com
Status Sipil :
Nama Suami : Irawan Moses, S.Pd
Nama Anak : Isabela Chelseanti
Raymond Valenciano
Richard Benficario

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Tamat SD tahun 1992 di SD. Katolik Beringin, Makassar
Tamat SLTP tahun 1995 di SMP. Ujung Pandang, Makassar
Tamat SLTA tahun 1998 di SMU. Kartika VII-I, Makassar
Sarjana (S1) tahun 2004 di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
Magister (S2) tahun 2020 di Universitas Hasanuddin, Makassar

Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
NIP : 19791013 200502 2 004
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Kasubid. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan
Kawasan, Bappeda Maros

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 28 Desember 2020



Jenny Octaria Panggabean

ABSTRAK

JENNY OCTARIA PANGGABEAN. *Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Urbanisasi di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Paulus Uppun dan Sri Undai Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda secara bertahap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros. Pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros. Investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros. Sementara pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja juga signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros.

Kata kunci: Urbanisasi, Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja



ABSTRACT

JENNY OCTARIA PANGGABEAN. *The Effect of Private Investment and Government Expenditure on Urbanization Level at Maros Regency* (supervised by Paulus Uppun and Sri Undai Nurbayanti).

The research aimed to analyze the effect of the private investment and government expenditure on the urbanization level at Maros Regency either directly or indirectly through the economic growth and job opportunity.

The research data were analyzed using the stage multiple linear regression.

The research result indicates that the private investment has the significant and positive effect on the urbanization level. The government expenditure has the significant and positive effect on the urbanization level. The private investment through the economic growth and job opportunity has the significant and positive effect on the urbanization level. Whereas, the government expenditure through the economic growth and job opportunity has also the significant and positive effect on the urbanization level at Maros Regency.

Key words: Urbanization, private investment, government expenditure, economic growth, job opportunity.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Investasi	12
2.1.1.1 Investasi Swasta	15
2.1.1.2 Pengeluaran Pemerintah	17
2.1.2 Urbanisasi	20
2.2 Tinjauan Empiris	28
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	32
3.1 Kerangka Pemikiran	32
3.2 Hipotesis	35
BAB IV METODE PENELITIAN	36
4.1 Rancangan Penelitian	36
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
4.3 Jenis dan Sumber Data	37
4.4 Metode Analisis	38
4.5 Definisi Operasional	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Deskripsi Data	42
5.1.1 Urbanisasi Di Kabupaten Maros	42
5.1.2 Kesempatan Kerja Di Kabupaten Maros	44
5.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Maros	45
5.1.4 Investasi Swasta Di Kabupaten Maros	47
5.1.5 Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Maros	49

5.2 Hasil Analisis	51
5.3 Pembahasan	55
5.3.1 Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	55
5.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap	56
Pertumbuhan Ekonomi	56
5.3.3 Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja	56
5.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja	57
5.3.5 Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Tingkat Urbanisasi	58
5.3.6 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Urbanisasi	58
5.3.7 Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Tingkat Urbanisasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja	59
5.3.8 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Urbanisasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja	60
5.3.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Urbanisasi	61
5.3.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja	63
5.3.11 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Urbanisasi	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Maros	8
Tabel 5.1	Penduduk Dan Urbanisasi Di Kabupaten Maros	43
Tabel 5.2	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Di Kabupaten Maros	45
Tabel 5.3	Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Maros	47
Tabel 5.4	Investasi Swasta Di Kabupaten Maros	49
Tabel 5.5	Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Maros	50
Tabel 5.6	Hasil Analisis Hubungan Variabel Secara Langsung	51
Tabel 5.7	Hasil Analisis Hubungan Variabel Secara Tidak Langsung	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Kerangka Pikir	35
Gambar 5.1 Hasil Analisis Hubungan Fungsional Antar Variabel	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan nasional.

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan menyejahterakan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Maros yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta investasi yang mempunyai cakupan cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka spasial, letak/posisi Kabupaten Maros sebagai kabupaten penyangga (*hinterland*) dari Kota Makassar. Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur dan selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Maros yaitu 1.619,12 Km² yang secara administrasi pemerintahannya terdiri dari 14 kecamatan, 23 kelurahan, dan 80 desa. Kabupaten Maros juga menempati posisi penting dalam tataran KSN Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), sehingga kedepannya perkembangan perkotaan Maros perlu didorong dengan perkembangan penataan perkotaan. Dibandingkan dengan kota, pengertian perkotaan (urban) lebih luas lagi karena merupakan suatu wilayah geografis yang meliputi kota dengan wilayah sekitarnya, tidak dilihat berdasarkan batas administrasi tetapi berdasarkan sifat kekotaannya. Dalam hal ini perkotaan dapat didefinisikan sebagai kawasan permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa kawasan pinggiran

sekitarnya/suburban. Definisi kawasan perkotaan di Indonesia secara formal adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

Berbagai jenis kegiatan yang ada di perkotaan seperti misalnya infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas komersial, permukiman, dan kawasan industri tentu saja tidak lepas dari peran investasi. Investasi pada hakekatnya adalah langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan tingkat pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, maka setiap daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu daerah akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Investasi di Kabupaten Maros terdiri dari investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri (PMDN dan PMA).

Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional, yang merupakan pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif. Dapat dikatakan bahwa investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi.

Menurut Nugroho (2008), investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian, karena dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta sebagai alat pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor, dan antar perorangan. Kebijakan investasi banyak mengalami perubahan dari setiap masa. Saat ini, investasi di Indonesia diatur dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pada pasal 3 menyebutkan ada beberapa tujuan dari adanya penanaman modal, yaitu : meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan PDRB sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono.2005). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pengeluaran pemerintah daerah (belanja) dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi.

Selain investasi, ada juga tenaga kerja yang merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Jumlah penduduk yang besar akan membentuk angkatan kerja yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2008) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Tingginya perkembangan penduduk pada daerah pusat kegiatan ekonomi adalah banyaknya masyarakat melakukan urbanisasi yang merupakan salah satu aspek migrasi yang akan mempengaruhi penambahan penduduk perkotaan (daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi). Todaro (2000) mengatakan bahwa munculnya urbanisasi yang berlebihan di suatu daerah dipicu oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang didukung oleh menurunnya angka kematian serta adanya kebijakan pemerintah yang cenderung bias kota (tertuju ke kota). Tingginya angka migrasi ke kota menyebabkan tidak meratanya distribusi penduduk atau persebaran penduduk di daerah perkotaan. Akibatnya kepadatan penduduk di daerah perkotaan semakin meningkat.

Banyak ahli ekonomi termasuk Todaro (1979) berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut

berkembang karena adanya ketimpangan antar daerah. Todaro menyebutkan motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari pada yang diperolehnya di tempat asal.

Pada dasarnya penyebab meningkatnya urbanisasi di negara berkembang yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang diiringi dengan keinginan untuk mencari pekerjaan (angkatan kerja) sehingga secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan bagi para urban tersebut, dengan kelebihan penghasilan selama mereka bekerja di kota akan berimbas secara langsung pada keluarga yang tinggal di desa sehingga dari segi pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih baik. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan pertambahan penduduk di daerah perkotaan semakin tinggi.

Akan tetapi meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk.

Disini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Karena dengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderung datang kepada pusat

kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Seperti halnya dengan keadaan di Kabupaten Maros dimana jumlah penduduk semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh adanya faktor penarik yang membawa orang untuk melakukan urbanisasi di perkotaan dan pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat terlihat pada tabel penduduk di Kabupaten Maros yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Maros

Tahun	Jumlah Penduduk Perkotaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Perdesaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Total (jiwa)
2002	66.263	210.874	277.137
2003	77.956	208.804	286.760
2004	91.713	197.671	289.384
2005	93.109	203.341	296.450
2006	94.527	203.091	297.618
2007	95.967	203.695	299.662
2008	97.428	205.783	303.211
2009	98.912	211.865	310.777
2010	100.829	218.173	319.002
2011	102.263	219.949	322.212
2012	103.976	221.425	325.401
2013	106.119	225.745	331.864
2014	106.603	228.993	335.596
2015	108.037	231.263	339.300
2016	109.103	233.787	342.890
2017	110.475	235.908	346.383
2018	111.720	238.102	349.822

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

Jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Maros yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu saja menjadikan Kabupaten Maros masuk dalam kategori kota kecil pada tahun 2002-2009, namun pada tahun 2010 jumlah

penduduk perkotaan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan sehingga hal ini membuat status perkotaan Kabupaten Maros berubah menjadi kota sedang, dimana kategori ini diperoleh dari salah satu kriteria kota yang dilihat dari jumlah penduduknya yang diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu :

- ✓ Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa.
- ✓ Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa.
- ✓ Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani 500.001 – 1.000.000 jiwa.
- ✓ Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani 1.000.001 - 5.000.000 jiwa.
- ✓ Kawasan Perkotaan Megapolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 5.000.001 jiwa.

Berdasarkan uraian diatas maka saya selaku penulis tesis ini tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah investasi swasta (PMA dan PMDN) mempunyai pengaruh terhadap tingkat urbanisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros ?

2. Apakah pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap tingkat urbanisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan yang secara khusus ingin dicapai sehubungan dengan rumusan permasalahan tersebut, yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh investasi swasta (PMA dan PMDN) terhadap tingkat urbanisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat urbanisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros baik itu secara fisik, ekonomi dan sosial serta variabel apa saja yang dominan berpengaruh terhadap investasi dan tingkat urbanisasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros.

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi terhadap penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintah maupun stakeholder terkait yang berkaitan dengan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah dan pengaruhnya terhadap tingkat urbanisasi di Kabupaten Maros.

Bagi masyarakat Kabupaten Maros, penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman tentang eksistensi dan peran yang diemban masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan regulasi dalam pembangunan (investasi) di wilayah perkotaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Investasi

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri/Asing (PMA). Investasi yang naik dari tahun ke tahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi akan naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja yang bekerja (Sukirno, 2000).

Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah

harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang diperoleh.

Pengeluaran investasi dapat juga meliputi pengeluaran yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini kegiatan investasi dapat dibedakan atas investasi yang otonom dan investasi yang terdorong (Harjanti, 2005). Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi terdorong adalah investasi yang saling mendukung satu sama lain. Dengan investasi otonom diharapkan akan meningkatkan permintaan yang pada gilirannya akan mendorong investasi.

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang.

Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini jumlah pengangguran tentunya akan menurun. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai

penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Dimana stagnasi merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat dan bahkan bisa nol atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Kondisi yang sangat tidak diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi pula, sehingga perekonomian negara menjadi stagflasi.

Jenis investasi juga dapat dibedakan atas *public investment* dan *private investment*, *domestic investment* dan *foreign investment*, *gross investment* dan *net investment*. *Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sifatnya resmi. Sedangkan *private investment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. *Domestic investment* adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. *Gross investment* adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu waktu, baik itu *autonomous* maupun *induced* atau *private* maupun *public*. Sedangkan *net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Para pelaku investasi adalah pemerintah, swasta, dan kerjasama pemerintah-swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya swasta tidak tertarik pada investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan

keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama (Brata, 2003) Pihak swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba, yang biasanya terdorong oleh adanya penambahan pendapatan.

2.1.1.1 Investasi Swasta

Hampir semua ahli ekonomi menekankan akan pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai penentu dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse dalam Jhinghan (2014) lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat diatasi dengan pembentukan modal. Pembentukan modal menekankan pada pengalokasian sebagian aktivitas produktif masyarakat dalam pembuatan barang modal seperti mesin, fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya yang dapat meningkatkan manfaat produktifnya, sehingga sumber daya yang ada pada masyarakat dapat dialihkan untuk meningkatkan persediaan barang modal yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Karenanya proses pembentukan modal sangat penting sekali untuk dilakukan seperti meningkatkan volume tabungan nyata, mengalokasikan tabungan melalui lembaga keuangan dan menginvestasikan tabungan.

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi untuk mengganti atau menambah barang modal sehingga kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian semakin meningkat di masa depan (Sukirno, 2000). Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar sehingga memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya.

Dalam analisa Schumpeter, pengusaha merupakan tokoh kunci dalam menghasilkan pembangunan ekonomi. Pengusaha merupakan golongan yang

terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi (Jinghan, 2014). Menurut Schumpeter pendapatan suatu negara tidak stabil dari waktu ke waktu, perkembangannya ditentukan oleh besar kecilnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pengusaha. Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan inovasi seperti pengenalan produk baru dan perbaikan yang terus menerus pada produk yang dilakukan oleh inovator, yaitu para pengusaha yang memiliki kemampuan untuk memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru. Mereka tidak menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi terdiri dari dua jenis yaitu :

✧ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

✧ Penanaman Modal Asing (PMA)

Merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang penanaman modal antara lain : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari

dalam negeri maupun dari luar negeri; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat atau daerah dalam jangka panjang untuk investasi baik itu berupa pembangunan infrastruktur maupun pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai produk ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pendapatan yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

➤ **Belanja aparatur**

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

➤ **Belanja pelayanan publik**

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

➤ Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis belanja yaitu hibah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer

➤ Belanja tidak terduga

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah
- Hutang (pinjaman) pada periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan
- Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan

Belanja daerah yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal.

WW. Rostov dan RA. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, dimana teori yang dikembangkan didalamnya terdapat tahapan pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu : tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut (Mangkoesoebroto, 2001)

➤ Tahap Awal

Perkembangan ekonomi pada tahapan awal ini, persentase investasi pemerintah pada taraf yang besar pada total investasi, hal ini disebabkan oleh pemerintah yang harus menyediakan prasarana yang memadai dalam sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya.

➤ Tahap Menengah

Agar dapat tinggal landas, faktor investasi sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun yang menjadi persoalan sekarang ini adalah justru peranan investasi swasta yang mendominasi, efek yang ditimbulkan dari banyaknya peranan investasi swasta ini adalah sering terjadinya kegagalan pasar sehingga menyebabkan beban baru bagi pemerintah untuk menyediakan barang-barang dengan jumlah yang besar dan juga kualitas yang baik. Salah satu resiko dari semakin besarnya perkembangan ekonomi adalah terjadinya hubungan yang melibatkan antar sektor yang semakin rumit. Sebagai akibat dari kondisi itu adalah investasi pemerintah terhadap GNP yang mengalami penurunan dan sebaliknya persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar.

➤ Tahap Lanjut

Pada tahap lanjut ini aktifitas pemerintah dan pembangunan ekonomi lebih bergeser orientasinya pada kesejahteraan untuk masyarakatnya yang sebelumnya berfokus pada penyediaan sarana prasarana yang kemudian bergeser menjadi program-program pengeluaran kesejahteraan seperti pelayanan kesehatan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap PDB semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap PDB akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat pada tahap lanjut pembangunan ekonomi terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti

kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave melandasi pendapatnya berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara (Dumairy, 1997).

Sedangkan menurut teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Adolph Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menentukan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

2.1.2 Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan meningkatnya persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang disebut urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi, skala ekonomi yang timbul dalam usaha non agraris sebagai hasil perubahan teknologi. Karena secara teknis transportasi, komunikasi berkembang menjadi efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skala optimum. Semua proses ini mempengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar perikehidupan.

Bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam didaerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk kekota dan/atau akibat dari perluasan daerah kota. Definisi urban berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lainnya tetapi biasanya pengertiannya berhubungan dengan kota-kota atau daerah-daerah pemukiman lain yang padat. Klasifikasi yang dipergunakan untuk menentukan daerah kota biasanya dipengaruhi oleh indikator mengenai penduduk, indikator mengenai kegiatan ekonomi indikator jumlah fasilitas urban atau status administrasi suatu pemusatan penduduk

Urbanisasi merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan penduduk, oleh karena itu berdasarkan dengan judul dari tesis ini dimana salah satu variabel yang ingin diteliti adalah mengenai urbanisasi yang terjadi di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten yang mulai berkembang dan menjadi penyangga untuk Kota Makassar.

Urbanisasi menurut Michael S. Bassis, dkk adalah "an increase in the persentage of a population in urban settlements and a resulting extension of the influence of urban culture and lifestyles" (suatu peningkatan persentase populasi di pemukiman perkotaan dan mengakibatkan penambahan yang mempengaruhi kebudayaan kota dan gaya hidup). Dalam buku Pengantar Sosiologi Kota yaitu "Kota Didunia Ketiga" yang dikarang oleh Dr.P.J.M.Nas. (1977), pada pengertian pertama diutarakan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupannya lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Pengertian kedua dari urbanisasi adalah bahwa urbanisasi menyangkut adanya gejala perluasan pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial dan psikologi. Sehingga secara garis besar pengertian

dari Urbanisasi adalah proses peningkatan angka penduduk perkotaan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti halnya kelahiran maupun perpindahan dari desa ke kota yang diakibatkan karena banyaknya daya tarik kota seperti halnya kesempatan kerja, pendapatan dan sebagainya.

Berbeda dengan perspektif ilmu kependudukan, definisi Urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Perpindahan itu sendiri dikategorikan 2 macam, yakni :

- Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota

- Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara saja atau tidak menetap

Urbanisasi memiliki pengertian dari berbagai sudut pandang. Dalam ilmu Geografi Urbanisasi berarti penambahan persentase jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Sedangkan seorang geografer De Bruijne (dalam Daldjoeni 1998) menjelaskan terdapat setidaknya tujuh pengertian dari urbanisasi antara lain : Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal diperkotaan; Perpindahannya penduduk ke kota-kota dari pedesaan; Bertambahnya penduduk bermata pencaharian non agraris dipedesaan; Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi perkotaan; Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial-morfologi suatu kota di kawasan sekelilingnya; Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan; Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke pedesaan

Pemukiman kota cenderung tumbuh terus, baik dalam hal luasnya maupun jumlahnya bersama dengan itu maka sudah semestinya bahwa proporsi

penduduk dunia kita yang tinggal dikota kecil maupun kota besar meningkat. Pertambahan proporsi tersebut juga disebut sebagai urbanisasi. Menurut Kingsley Davis (1965) urbanisasi adalah jumlah penduduk yang memusat di daerah perkotaan atau meningkatnya proporsi tersebut. Urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu proses dalam artian :

- ◆ Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk kota dimana kota menjadi lebih padat sebagai akibat dari penambahan penduduk, baik oleh hasil kenaikan fertilitas penghuni kota maupun karena adanya tambahan penduduk dari desa yang bermukim dan berkembang di kota.
- ◆ Bertambahnya jumlah kota dalam suatu Negara atau wilayah sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi.
- ◆ Berubahnya kehidupan desa atau suasana desa menjadi suasana kehidupan kota.

Urbanisasi biasanya dapat diukur dengan melihat proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Untuk mengukur tingkat urbanisasi di suatu daerah biasanya dengan menghitung perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk seluruhnya dalam suatu wilayah. Adapun tingkat urbanisasi yang terjadi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PU = \frac{U}{P} \times 100 \%$$

Dimana :

U = jumlah penduduk daerah kota

P = jumlah penduduk keseluruhan (jumlah penduduk total)

PU = Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan

Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan kota. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor penarik maupun pendorong. Perkembangan industri dan

perdagangan di kota merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang untuk mendatanginya. Keinginan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya urbanisasi.

Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan perkotaan, khususnya ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Migran biasanya mempunyai alasan yang selektif. Sifat selektif itu berbeda-beda, ada arus migrasi yang sifat positif dan selektif negatif. Sifat positif berarti bahwa migrasi itu melibatkan orang-orang yang berkualitas tinggi dan sifat negatif adalah sebaliknya.

Migran yang tertarik pada faktor-faktor positif di daerah perkotaan cenderung merupakan seleksi positif. Orang-orang seperti ini melakukan migrasi karena dapat melihat adanya kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang lebih baik. Bagi daerah urban kedatangan orang-orang seperti ini malah menguntungkan karena biasanya mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, memiliki cukup keterampilan dan semangat juang yang tinggi serta produktif. Migran dengan klasifikasi seperti inilah yang sebenarnya yang mempunyai peran sangat besar dalam memacu perkembangan daerah kota kearah lebih baik.

Tingginya angka urbanisasi ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penarik dan pendorong yang menyebabkan penduduk pedesaan atau penduduk daerah lain tersebut melakukan perpindahan kedaerah perkotaan (daerah yang lebih baik) antara lain sebagai berikut :

- Faktor-faktor pendorong (push factor) adalah :

- ✓ Makin berkurangnya sumber–sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang–barang tertentu yang bahan bakunya makin sulit diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan pertanian (yang bersumber dari alam).
- ✓ Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, sebagai contoh dapat kita lihat tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang semakin sempit, dapat kita lihat banyaknya daerah pertanian yang diambil alih dan dibangun pemukiman masyarakat.
- ✓ Adanya tekanan–tekanan, seperti politik, agama dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asalnya.
- ✓ Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
- ✓ Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.
 - Faktor – faktor penarik (pull factor) adalah :
- ✓ Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
- ✓ Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- ✓ Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas–fasilitas publik lainnya.
- ✓ Adanya aktifitas–aktifitas di luar kota besar, tempat–tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang lain untuk bermukim di kota besar.

Menurut King and Colledge (1978), urbanisasi dikenal melalui empat proses utama, yaitu :

- Adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan dan sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan daerah sekitarnya.

- Adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan wilayah disekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap arus bolak-balik, kota–desa.
- Difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota.
- Migrasi dan permukiman baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara terus menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi dan perubahan pandangan penduduk desa mendorong mereka memperbaiki keadaan sosial ekonomi.

Sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk yang ditunjang dengan perkembangan ekonomi, transportasi dan pendidikan, frekuensi mobilitas yang semakin meningkat, urbanisasi memiliki implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan (Bintoro, 1986) adalah :

- ❖ Sektor ekonomi dalam struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi. Berbagai macam usaha atau kegiatan di bidang transportasi, perdagangan dan jasa timbul dari mereka yang bermodal kecil sampai bermodal besar.
- ❖ Perkembangan di bidang wiraswasta juga tampak meluas misalnya saja peternakan, kerajinan tangan dan lain–lain.
- ❖ Berkembangnya bidang pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
- ❖ Meluasnya kota kearah pinggiran kota sehingga transportasi menjadi lebih lancar.
- ❖ Meningkatnya harga tanah, baik di kota maupun pinggiran kota.

- ❖ Berkembangnya industrialisasi sebab tenaga kerja murah dan melimpah, pasaran meluas dan industri cenderung lebih berkembang.

Akibat dari pengembangan dan pembangunan wilayah perkotaan dapat menimbulkan berbagai jenis dampak lingkungan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak lingkungan kota yang bersifat negatif dapat timbul dari kota-kota besar di dunia dan terutama di Negara–Negara berkembang. Gangguan terhadap kualitas hidup adalah adanya ketimpangan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Adapun dampak lingkungan kota yang berkaitan dengan urbanisasi adalah antara lain :

- ❖ Pertambahan penduduk kota yang begitu cepat, sudah sulit diikuti dengan kemampuan daya dukung kotanya.
- ❖ Penambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri kota tidak henti-hentinya, menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi pendengaran manusia.
- ❖ Pengembangan industri di kota atau dekat kota menghasilkan bahan sisa industri yang harus dibuang dan berbagai limbah industri lainnya.

Dalam teori pengembangan wilayah sendiri dibagi menjadi 4 kategori yaitu : yang pertama, kelompok yang menitikberatkan pada kemakmuran wilayah. Yang kedua, fokus pada sumberdaya alam dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan produksi/*sustainable development*. Kelompok ketiga menitikberatkan pada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan. Kelompok yang keempat memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat didalam daerah tersebut. Menurut teori Neoklasik bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi adalah salah satu saat semua kegiatan manusia terakumulasi. Dasar teori ini terletak pada komponen produksi yang sangat

berpengaruh terhadap perkembangan wilayah antara lain : modal, tenaga kerja dan teknologi.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terkait dengan Investasi dan Urbanisasi telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya :

Hasil penelitian Pratiwi Oktavia (2008) dengan judul Proses Urbanisasi di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, populasi penelitian adalah seluruh daerah pinggiran Kota Surakarta di bagian timur yakni Kecamatan Jaten, sampel diambil berdasarkan sampling area yakni mengambil sampel di dua desa di Kecamatan Jaten, yaitu Desa Jaten dan Desa Ngringo. Teknik sampling yang digunakan adalah Cluster Sampling atau sampel gugus, dengan sampel sebanyak 100 orang kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah overlay Peta Rupa Bumi Digital Indonesia tahun 1998 dan citra Ikonos hasil rekaman tahun 2008 dilengkapi data lapangan tahun 2009, dan analisis tabel silang. Dari analisis data diperoleh hasil, transformasi spasial yakni konversi lahan pertanian ke permukiman selama kurun waktu 10 tahun mencapai 34%; konversi lahan pertanian ke industri mencapai 8 %, sedangkan konversi lahan pertanian ke sektor perdagangan dan jasa mencapai 17%. Transformasi ekonomi sosial terjadi di daerah penelitian seiring dengan adanya proses urbanisasi yakni pergeseran sudut pandang mengenai pekerjaan, pendidikan dan ketaatan dalam menjalankan ibadahnya.

Yan Frianta Situmorang (2009) dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Urbanisasi di Sumatera Utara, menerangkan bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi di

Sumatera Utara dengan peningkatan tingkat urbanisasi sebesar 0,0009 jiwa atau setiap kenaikan pendapatan perkapita 1 juta rupiah maka akan menyebabkan peningkatan tingkat urbanisasi penduduk sebesar 90 jiwa pertahunnya. Sedangkan dilihat dari sisi angkatan kerja maka tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh pada tingkat urbanisasi.

Hari Handoko (2012) melakukan penelitian untuk melihat Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ngawi, salah satu yang menjadi hasil dari penelitian tersebut adalah variabel pengeluaran belanja pemerintah daerah ternyata berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh kondisi internal pada obyek penelitian yang dalam hal ini Kabupaten Ngawi yang pada saat pengambilan data ternyata terlihat hasilnya berbeda dengan teori yang sudah ada.

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap (2013) yang berjudul Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Perkotaan di Indonesia. Dalam kesimpulan pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu bagi sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik, maupun secara sosial..

Luh Kitty Katherina (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Tren Urbanisasi Pada Secondary Cities di Indonesia Periode Tahun 1990-2010. Penelitian yang dilakukan menggambarkan tren urbanisasi yang terjadi pada kota kedua di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui perbandingan data hasil Sensus Penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010.

Secara umum tren urbanisasi pada kota-kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola dimana laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota. Jumlah penduduk pada kota-kota lapis kedua terus meningkat, namun rata-rata laju pertumbuhan per tahunnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Nasional serta dengan wilayah (kabupaten/kota) sekitarnya. Wilayah pinggiran tumbuh lebih cepat sebagai luapan aktivitas ekonomi dari kota utama membentuk kawasan perkotaan yang luas melewati batas administrasi. Jumlah penduduk perkotaan juga terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya semakin melambat. Pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2000-2010, meskipun demikian urbanisasi merupakan suatu proses yang terjadi beriringan dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sehingga cenderung akan terus terjadi.

Abet Nego Imanuel (2014) dengan judul Analisis Pendapatan dan Angkatan Kerja Terhadap Urbanisasi di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data skunder runtun waktu (time series) mulai dari tahun 1998 hingga tahun 2012. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode Ordinary Last Square (OLS) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependent yakni Tingkat Urbanisasi di Kota Bengkulu dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Pendapatan Perkapita dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bengkulu sebesar 83,47%. Secara parsial variabel Pendapatan Perkapita dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat Urbanisasi di Kota Bengkulu.

Al Muizzuddin Fazaalloh (2017) dengan judul penelitian Urbanisasi, Industrialisasi, Pendapatan, dan Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi OLS. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa industrialisasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap urbanisasi, tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif, kemudian tingkat pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan dan positif terhadap urbanisasi di Indonesia. Untuk mengendalikan arus urbanisasi, maka pemerintah perlu memahami bagaimana kondisi industrialisasi, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan di Indonesia.

Luciana Sari (2018) dalam penelitiannya yang mengambil judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Urbanisasi di Kota Makassar Tahun 2001-2015. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PDRB, upah minimum, kesempatan kerja sedangkan variabel terikat yaitu urbanisasi. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear model semilog (log-lin) atau model pertumbuhan. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam mengatasi tingginya laju perpindahan penduduk atau urbanisasi ke kota Makassar, perlu adanya peran pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pertumbuhan PDRB di kota Makassar. Dalam melakukan urbanisasi dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan maka perlu adanya skill atau kemampuan guna menunjang kebutuhan tenaga kerja di kota Makassar. Agar terkendalinya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan kriminal yang terus terjadi di kota Makassar.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, maka disusunlah kerangka pikir dimana kerangka pikir ini dimaksudkan untuk memberikan tuntunan deduktif melalui teori yang ada, karena teori mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat dipakai pada kasus-kasus khusus.

Letak Kabupaten Maros yang merupakan kabupaten penyangga (*hinterland*) dari Kota Makassar yang termasuk dalam bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata juga berdampak dengan perkembangan kota yang terjadi di Kabupaten Maros yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja maupun para pengusaha atau pedagang baik dari dalam kota itu sendiri maupun luar wilayah kota untuk berinvestasi, sehingga menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi yang berdampak pada penambahan jumlah penduduk.

Kesejahteraan masyarakat dikatakan baik jika ada indikasi suatu wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Agar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat diperlukan campur tangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan menyediakan barang publik yang cukup dan

memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien (Sadono, 2013)

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk nyata dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan yang akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perekonomian suatu negara. Selama ini tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Swaramarinda & Indriani (2011), pengeluaran investasi pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengeluaran investasi pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat yang fungsinya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Karena investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2012). Investor dalam melakukan investasi tidak dapat mengabaikan peran masyarakat dan pemerintah selaku stakeholder. Kelangsungan hidup investasi sangat bergantung pada peran dari pemerintah maupun masyarakat, demikian juga sebaliknya. Sehingga hubungan antara masyarakat, pemerintah dan investor sangat erat sekali terutama dalam bidang pembangunan ekonomi.

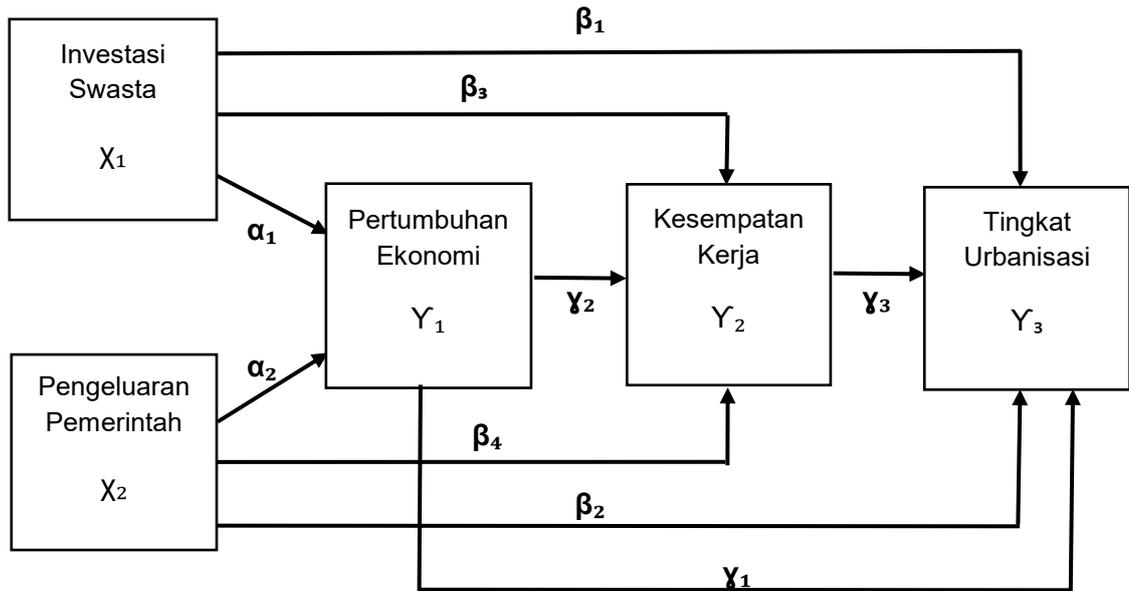
Menurut Samuelson & Nordhaus (1996) investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam meningkatkan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembentukan modal sebagai faktor produksi merupakan komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal disebutkan bahwa tujuan

penyelenggaraan penanaman modal diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan kota, dimana proporsi jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor penarik maupun faktor pendorong. Perkembangan industri dan perdagangan di kota merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang untuk mendatanginya. Perkembangan kota yang didukung oleh sarana prasarana ini juga membuka peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan hidup yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya urbanisasi.

Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan perkotaan, khususnya ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktifitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Untuk Kabupaten Maros sendiri berdasarkan dari kriteria jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan maka status kotanya masuk dalam kota kecil pada tahun 2002-2009, namun pada tahun 2010-2018 status perkotaan di Kabupaten Maros meningkat menjadi kota sedang.

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan suatu penelitian untuk mencari faktor apa yang kiranya menjadi pengaruh bagi investasi baik swasta maupun pemerintah dengan arus urbanisasi yang terjadi di Kabupaten Maros. Untuk alur kerangka pikir penulisan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1. Alur Kerangka Pikir

3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian yang dilakukan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Investasi Swasta berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat urbanisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat urbanisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Maros